

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

Ahmad Dinar, Syaiful, KPK & KORUPSI (Dalam Studi Kasus), (Jakarta: Cintya Press, 2012).

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010).

Amrani, Hanafi, Politik Pembaharuan Hukum Pidana, (Yogyakarta: UII Press, 2019).

Atmasasmita, Romli, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Barama, Michael, Tindak Pidana Khusus, (Manado: Unsrat Press, 2015)

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002).

Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012).

Hamzah, Andi, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

Hanitijo Soemitro, Ronny, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981),

- Hanitijo Soemitro, Ronny, Metodologi penelitian hukum dan jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),
- Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Hatta, Muhammad, Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2019)
- Kasiyanto, Agus, Teori dan Praktik: Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992).
- Mulyadi, Lilik, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Nandang Alamsah Deliarnoor dan Sigid Suseno, Tindak Pidana Khusus, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2015)
- Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Formulasi: Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan, (Semarang: Elangtup Kinasih, 2016)

Nawawi Arief, Barda, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000).

_____, RUU KUHP: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2017).

_____, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2001).

_____, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).

Nawawi, Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991),

Pile Tukan, John Paulus, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Anak Korban Pencabulan, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005),

Pujiyono, Tindak Pidana Korupsi, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017)

Putra Jaya, Nyoman Serikat, Politik Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

_____, Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

- _____, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005),
- Rahardjo, Satjipto, ILMU HUKUM (Cetakan Ketujuh), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
- Siahaan, Monang, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat (Cetakan Kesembilan), (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986).
- _____, Hukum Pidana I(Cetakan Kelima), (Semarang: Yayasan Soedarto, 2018)
- Suharto, Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objek Sebagai Dasar Dakwaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Supriyadi Widodo Eddyono, *dkk.*, Melihat Rencana Kodifikasi dalam RKUHP: Tantangan Upaya Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015)
- Suryana, Metodologi Penelitian (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010)
- Suteki & Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018).

Tongat, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,
(Malang: UMM Press, Cet. Ke-2, 2009),

Utsman, Sabian, Metodologi Penelitian Hukum Profresif, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2014).

Yamin, Muhammad, Tindak Pidana Khusus, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Yunara, Edi, Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2012).

ii. Jurnal Ilmiah

Claudia, Natasya, Pembaharuan Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana
Korupsi, (Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Semarang, 2018).

Ifrani, “*Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa*”, (Al’Adl, Vol IX
No.3, 2017).

Junaidi Abdullah, “*Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan
Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, (Yudisia, Vol.5 No.1, 2014)

iii. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/Prp/Tahun 1960 Tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM-06/1957

Peraturan Penguasa Militer PRT/PM-08/1957

Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957

Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/013/1958

Peraturan Penguasa Militer Angkatan Laut Nomor PRT/zl/017

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Versi Bulan
September Tahun 2013.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Tahun 2015

iv. Tesis

Muhammad Insan Kamil, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana
Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, (Magister Ilmu Hukum,
Universitas Diponegoro, 2013).

Ridwan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak
Pidana Korupsi”, (Tesis Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro, 2004).

v. Seminar

Seminar RUU KUHP

vi. Wawancara

Prof. Barda Nawawi Arief, S.H.

vii. Internet

Detik.com, “Pemerintah nyatakan tak turunkan hukuman koruptor di rkuhp”,
Diakses pada tanggal 24 Agustus 2020, “<https://news.detik.com/berita/d-4056061/pemerintah-nyatakan-tak-turunkan-hukuman-koruptor-di-rkuhp>”.

Detik.com, “Prof Muladi delik korupsi masuk KUHP tak hapus kekhususan KPK”
Diakses pada tanggal 14 Juli 2020. “<https://news.detik.com/berita/d->

3030986/prof-muladi-delik-korupsi-masuk-kuhp-tak-hapus-kekhususan-kpk”.

DPR RI, “http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-18-II-P3DI-September-2016-71.pdf” Diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

Government.NL, “Sentences and non punitive orders”, Diakses pada tanggal 10 Juli 2020. “<https://www.government.nl/topics/sentences-and-non-punitive-orders/fines-and-damagesz>’.

Hukum Online, “Tim Perumus RKUHP Bantah Lemahkan Kewenangan KPK”, Diakses pada tanggal 9 Februari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b17b19bc6920/tim-perumus-rkuhp-bantah-lemahkan-kewenangan-kpk/>.

Kompas.com, “Anggota Panja RKUHP ada Pasal yang tidak dibaca oleh KPK” Diakses pada tanggal 23 Juli 2020 “<https://nasional.kompas.com/read/2018/06/06/15295431/anggota-panja-rkuhp-ada-pasal-yang-tidak-dibaca-oleh-kpk?page=all>”.

Legislationline, KUHP Jerman, Diakses pada tanggal 9 Juni 2020, “https://www.legislationline.org/download/id/6115/file/Germany_CC_a_m2013_en.pdf”.

Reformasi KUHP, “Merancang arah pembaharuan hukum pidana Indonesia” Diakses pada tanggal 13 Juli 2020. “<http://reformasikuhp.org/merancang-arah-pembaruan-hukum-pidana-indonesia/>”.

Reformasi KUHP, “Bab Tindak Pidana Khusus Tetap Masuk Dalam RKUHP”

Diakses pada tanggal 3 Juni 2020. “<http://reformasikuhp.org/bab-tindak-pidana-khusus-tetap-masuk-dalam-rkuhp/>”.

Reformasi RKUHP, “Laporan singkat rapat panja komisi III DPR RI dengan

Pemerintah dalam rangka pembahasan RKUHP”, Diakses pada tanggal 24

Agustus 2020, [http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-](http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp-2/)

[komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp-](http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp-2/)

[2/](http://reformasikuhp.org/laporan-singkat-rapat-panja-komisi-iii-dpr-ri-dengan-pemerintah-dalam-rangka-pembahasan-r-kuhp-2/).

Refworld, “KUHP Republik Korea”, Diakses pada tanggal; 10 Juli 2020.

“<https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>”.

Republika,. “Vonis Ringan Koruptor Marak Sepanjang 2019”. Diakses pada

tanggal 9 Februari 2020. [https://republika.co.id/berita/q3ar58415/vonis-](https://republika.co.id/berita/q3ar58415/vonis-ringan-koruptor-marak-sepanjang-2019)

[ringan-koruptor-marak-sepanjang-2019](https://republika.co.id/berita/q3ar58415/vonis-ringan-koruptor-marak-sepanjang-2019)

Tempo, “Anggota Tim Perumus Pemerintah, Enny Nurbaningsih: Salah Besar

Ada Pelemahan Pemberantasan Korupsi” Diakses pada tanggal 23

September 2020. [https://majalah.tempo.co/read/hukum/155678/anggota-](https://majalah.tempo.co/read/hukum/155678/anggota-tim-perumus-pemerintah-enny-nurbaningsih-salah-besar-ada-pelemahan-pemberantasan-korupsi)

[tim-perumus-pemerintah-enny-nurbaningsih-salah-besar-ada-pelemahan-](https://majalah.tempo.co/read/hukum/155678/anggota-tim-perumus-pemerintah-enny-nurbaningsih-salah-besar-ada-pelemahan-pemberantasan-korupsi)

[pemberantasan-korupsi](https://majalah.tempo.co/read/hukum/155678/anggota-tim-perumus-pemerintah-enny-nurbaningsih-salah-besar-ada-pelemahan-pemberantasan-korupsi)

Youtube, “Blak-blakan Prof Muladi: Apa Kita Lebih Suka KUHP Penjajah”

Diakses pada tanggal 9 Februari 2020.

“https://www.youtube.com/watch?v=5_heD8jucQw&t=752s”,

Youtube, “Dialog 3 RUU KUHP Fakultas Hukum Universitas Diponegoro”

Diakses pada tanggal 3 Juni 2020.

“<https://www.youtube.com/watch?v=O5VmMiygiuc&t=1293s>”.